

Penguatan Komunikasi Publik Aparatur Desa Jambudipa

Yunita Fourina Dewi¹⁾, Lilis Suryani²⁾, Evan Haviana³⁾, Yoana Nurul Asri⁴⁾

¹Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Nurtanio Bandung, Indonesia

²Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Horizon Indonesia

³Program Studi Teknik Logistik, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Ibnu Sina, Indonesia

⁴Program Studi Avionika, Fakultas Teknik, Universitas Nurtanio Bandung, Indoensia

e-mail: 1fourina.dewi@gmail.com, 2lilis.suryanifa@gmail.com, 3evan.haviana@uis.ac.id, 4ynurulasri@gmail.com

ABSTRACT

The community service program on strengthening public communication of village officials was carried out in Kampung Gandrung, Jambudipa Village, Cisarua Subdistrict, West Bandung Regency, from August 18 to September 12, 2025. This program aimed to improve the quality of public communication among village officials in order to build more open, participatory, and harmonious interactions with the community. The implementation methods included licensing and coordination with village leaders, program socialization to the community, interactive discussions between officials and residents, and the use of the Indonesian Independence Day celebration as a momentum to strengthen social solidarity. The results indicated positive changes from both the officials and the community. Village officials became more open in listening to aspirations and responding with empathy, while residents showed greater confidence in voicing their opinions. The involvement of village officials in social activities fostered emotional closeness, reduced social distance, and created more egalitarian relations. In addition, a simple digital communication channel was established to facilitate faster information distribution. This program demonstrates that effective public communication plays an important role in reducing potential misunderstandings, strengthening social cohesion, and supporting the realization of transparent and accountable village governance.

Keywords: Community participation, Jambudipa Village, Public communication, Social solidarity, Village officials,

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penguatan komunikasi publik aparatur desa dilaksanakan di Kampung Gandrung, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada 18 Agustus hingga 12 September 2025. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas komunikasi publik aparatur desa agar mampu menciptakan interaksi yang lebih terbuka, partisipatif, dan harmonis dengan masyarakat. Metode pelaksanaan meliputi tahap perizinan dan koordinasi dengan perangkat desa, sosialisasi program kepada masyarakat, diskusi interaktif antara aparatur dan warga, serta pemanfaatan momentum peringatan HUT RI untuk memperkuat solidaritas sosial. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan positif baik dari sisi aparatur maupun masyarakat. Aparatur desa lebih terbuka dalam mendengarkan aspirasi dan merespons dengan empati, sementara warga semakin berani menyampaikan pendapat secara langsung. Kehadiran aparatur dalam kegiatan sosial mempererat kedekatan emosional, mengurangi jarak sosial, dan mendorong terciptanya hubungan yang egaliter. Selain itu, terbentuk kanal komunikasi sederhana melalui media digital yang membantu mempercepat distribusi informasi. Kegiatan ini membuktikan bahwa komunikasi publik yang baik berperan penting dalam mengurangi potensi kesalahpahaman, memperkuat rasa kebersamaan, serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci: Aparatur desa, Desa Jambudipa, Komunikasi publik, Partisipasi masyarakat, Solidaritas sosial,

PENDAHULUAN

Pariwisata, pertanian, dan aktivitas sosial-budaya menjadikan Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, sebagai wilayah yang dinamis dan berkembang. Pertumbuhan jumlah

penduduk, beragamnya latar belakang sosial, serta semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat mendorong aparatur desa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks inilah, komunikasi publik memegang peranan strategis sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah desa dengan warganya. Tanpa adanya komunikasi publik yang efektif, berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat berpotensi mengalami kendala, baik dalam proses penyampaian informasi, pemahaman masyarakat, maupun dalam tahap implementasi (Windiasih, 2019; Tasyah et al, 2021).

Komunikasi publik bukan hanya soal menyampaikan pesan secara satu arah dari aparatur desa kepada warga, melainkan juga membangun dialog timbal balik yang sehat, terbuka, dan partisipatif. Aparatur desa dituntut mampu menjalin komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat, mendengarkan aspirasi, menampung kritik, serta menjawab berbagai kebutuhan warga dengan cara yang transparan dan akuntabel. Kualitas komunikasi publik yang baik diyakini mampu meminimalkan potensi kesalahpahaman (misskomunikasi), menghindarkan prasangka (suudzon), serta menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga tercipta suasana desa yang damai, tenteram, dan kondusif. Hal ini sejalan dengan pandangan Utami dan Murwani (2025) yang menekankan peran komunikasi antarbudaya dalam mengatasi konflik sosial di masyarakat multikultural, serta Santoso et al. (2025) yang menegaskan bahwa konsep dasar ilmu komunikasi menjadi fondasi penting dalam membangun interaksi sosial yang sehat. Lebih jauh, Mingkid dan Harilama (2018) menunjukkan bahwa komunikasi organisasi pemerintah desa berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pelayanan publik di tingkat lokal. Dengan demikian, komunikasi publik yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai strategi membangun solidaritas sosial dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif.

Desa Jambudipa sebagai bagian dari wilayah Bandung Barat memiliki keunikan tersendiri. Letaknya yang strategis di kawasan Cisarua membuat desa ini bersinggungan dengan sektor pariwisata sekaligus masih mempertahankan karakter pedesaan yang erat dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Sunda. Kondisi ini memunculkan tantangan bagi aparatur desa dalam menyampaikan informasi, karena keberagaman kebutuhan warga cukup tinggi. Ada kelompok masyarakat yang fokus pada usaha wisata, sebagian lagi bergerak di bidang pertanian, dan tidak sedikit pula yang beraktivitas di sektor informal. Kompleksitas ini menuntut adanya penguatan komunikasi publik agar seluruh informasi yang disampaikan oleh aparatur desa dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan perbedaan tafsir di masyarakat.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat juga menuntut aparatur desa untuk beradaptasi. Masyarakat kini semakin terbiasa menggunakan media sosial, aplikasi pesan singkat, dan berbagai kanal digital sebagai sumber informasi. Aparatur desa perlu memanfaatkan peluang ini dengan menghadirkan komunikasi publik berbasis digital yang cepat, transparan, dan akurat. Namun, di sisi lain, derasnya arus informasi juga rawan menimbulkan hoaks, misinformasi, atau bahkan fitnah yang dapat merusak keharmonisan sosial. Dengan demikian, kemampuan aparatur desa dalam mengelola komunikasi publik menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial di Desa Jambudipa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada penguatan komunikasi publik aparatur desa hadir sebagai salah satu solusi nyata untuk menjawab kebutuhan tersebut. Program ini tidak hanya melatih keterampilan aparatur desa dalam menyampaikan informasi, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan mendengarkan, memahami aspirasi warga, serta mengelola konflik komunikasi yang mungkin terjadi. Melalui pengabdian masyarakat ini, aparatur desa diharapkan dapat lebih profesional, komunikatif, dan responsif terhadap dinamika sosial yang ada. Penguatan komunikasi publik juga berkaitan erat dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Warga yang merasa dilibatkan dan diberi ruang untuk berpendapat akan lebih memiliki rasa memiliki terhadap program-program desa. Partisipasi aktif ini tidak hanya mempercepat keberhasilan pembangunan, tetapi juga memperkokoh ikatan sosial di antara warga. Hal ini sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana keterbukaan informasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi fondasi utama (Hana & Rahman, 2024; Rusmanto et al, 2025)

Nurdin (2019) mengatakan bahwa komunikasi publik yang efektif berimplikasi langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Aparatur desa yang mampu menyampaikan informasi dengan jelas, lugas, dan ramah akan membuat masyarakat merasa dihargai. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menimbulkan rasa kecewa, curiga, bahkan konflik horizontal. Oleh karena itu, penguatan komunikasi publik tidak bisa dipandang sebagai aspek tambahan, melainkan sebagai kebutuhan utama yang menentukan keberhasilan pembangunan desa. Masyarakat desa masih sangat menjunjung tinggi nilai gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Nilai-nilai ini hanya dapat dijaga apabila aparatur desa mampu menjadi teladan dalam membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh empati. Melalui komunikasi yang baik, setiap problematika sosial seperti perbedaan pandangan, konflik kepentingan, atau isu-isu lokal dapat diatasi tanpa menimbulkan perpecahan.

Dari sisi akademik, penelitian dan kegiatan pengabdian tentang komunikasi publik aparatur desa di Desa Jambudipa menjadi penting karena dapat memberikan kontribusi nyata terhadap literatur dan praktik ilmu komunikasi pemerintahan. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana komunikasi publik diterapkan di tingkat desa, serta memberikan model atau rekomendasi yang dapat diadopsi oleh desa-desa lain di Indonesia. Apalagi, desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Keberhasilan komunikasi publik di tingkat desa akan berdampak luas pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, adanya program penguatan komunikasi publik di Desa Jambudipa juga menjadi bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk tidak hanya menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi juga turut serta memberikan solusi atas persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Kegiatan ini bukan hanya memberi manfaat langsung bagi aparatur desa dan warga Jambudipa, tetapi juga memperkuat hubungan sinergis antara perguruan tinggi dan masyarakat. Tujuan utama dari penguatan komunikasi publik aparatur desa di Desa Jambudipa adalah menciptakan kondisi masyarakat yang lebih harmonis, terbuka, dan partisipatif. Desa yang tenteram bukanlah desa yang bebas dari perbedaan, melainkan desa yang mampu mengelola perbedaan melalui komunikasi yang baik. Dengan komunikasi publik yang terarah dan berkesinambungan, Desa Jambudipa diharapkan mampu menjadi contoh bagaimana aparatur desa dapat berperan sebagai fasilitator, mediator, sekaligus motor penggerak pembangunan. Dengan cara ini, aparatur desa Jambudipa akan semakin siap menghadapi berbagai tantangan komunikasi di era digital, sekaligus menjaga nilai-nilai lokal yang menjadi identitas masyarakatnya.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penguatan komunikasi publik aparatur desa Jambudipa dilaksanakan di Kampung Gandrung, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat dengan narasumber dari Forum Komunikasi Dosen (FKD). Rangkaian kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih satu bulan, dimulai pada tanggal 18 Agustus hingga 12 September 2025. Pemilihan lokasi di Kampung Gandrung didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki dinamika sosial yang cukup beragam dan sering kali membutuhkan keterlibatan aktif aparatur desa dalam menjalin komunikasi dengan warga. Metode pelaksanaan kegiatan dirancang dengan menekankan pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, sehingga komunikasi publik tidak hanya dipahami sebagai aktivitas formal semata, tetapi juga sebagai praktik sosial yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Tahapan kegiatan dimulai dengan perizinan dan koordinasi awal. Tim pelaksana terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada aparatur desa, ketua RT, dan ketua RW di wilayah Kampung Gandrung untuk menjelaskan tujuan kegiatan serta memperoleh dukungan penuh. Proses perizinan ini bukan hanya sekadar pemenuhan prosedur administratif, melainkan juga menjadi momen awal membangun kepercayaan antara penyelenggara kegiatan dengan pemerintah desa. Melalui koordinasi yang intensif, pihak desa dapat memahami rencana kegiatan secara utuh, sementara tim pelaksana memperoleh

gambaran lebih jelas mengenai kondisi sosial masyarakat setempat yang akan menjadi peserta dalam program ini.

Setelah tahap perizinan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi program. Sosialisasi dilakukan secara terbuka kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh setempat agar warga mengetahui manfaat dan urgensi dari penguatan komunikasi publik. Sosialisasi ini berperan penting sebagai langkah awal menciptakan keterbukaan informasi, sebab masyarakat akan lebih mudah terlibat apabila mereka memahami arah dan tujuan kegiatan yang akan dijalankan. Pada tahap ini, aparatur desa diperkenalkan pada konsep dasar komunikasi publik, khususnya bagaimana pola komunikasi yang baik dapat mencegah munculnya kesalahpahaman, prasangka, maupun konflik sosial di tengah masyarakat.

Agenda utama dari kegiatan ini adalah diskusi interaktif. Diskusi dirancang tidak dalam bentuk ceramah satu arah, tetapi melalui dialog terbuka yang memungkinkan warga menyampaikan pendapat, pertanyaan, maupun keluhan secara langsung kepada aparatur desa. Aparatur desa, di sisi lain, dilatih untuk menanggapi setiap pertanyaan dengan bahasa yang sederhana, jelas, serta penuh empati. Format diskusi interaktif ini menjadi penting karena komunikasi publik pada hakikatnya adalah proses dua arah yang menuntut keterampilan mendengar, memahami, dan memberikan respons yang tepat. Melalui forum ini, tercipta ruang komunikasi yang sehat, sehingga masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.



Gambar 1. Warga Bersama Aparatur Desa Desa Jambudipa Berpartisipasi dalam Kegiatan Peringatan HUT RI di Kampung Gandrung

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tidak hanya berfokus pada diskusi formal antara aparatur desa dan warga, tetapi juga mengintegrasikan momentum kebersamaan dalam peringatan HUT RI. Salah satu bentuk kegiatan adalah partisipasi warga dan aparatur dalam acara hiburan dan kegiatan perlombaan yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari ibu-ibu hingga perangkat RT/RW seperti terlihat pada Gambar 1. Melalui kegiatan ini, suasana kebersamaan dan solidaritas terjalin dengan hangat, menciptakan ruang komunikasi yang cair, tanpa sekat, serta menumbuhkan rasa saling menghargai antara masyarakat dan aparatur desa. Kegiatan semacam ini menjadi sarana efektif untuk memperkuat komunikasi publik, mengurangi potensi

kesalahpahaman, sekaligus membangun kedekatan emosional yang mendukung terciptanya lingkungan desa yang harmonis dan tentram.

Momentum peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus juga menjadi bagian penting dari metode pelaksanaan kegiatan. Walaupun acara peringatan HUT RI telah menjadi agenda rutin tahunan, pada tahun ini momen tersebut dimanfaatkan secara khusus untuk memperkuat solidaritas antara aparatur desa dan warga. Kegiatan kebersamaan seperti upacara bendera, lomba rakyat, hingga kerja bakti bersama dijadikan sarana membangun kedekatan emosional yang lebih cair antara pemerintah desa dengan masyarakat. Kehadiran aparatur desa dalam suasana perayaan yang penuh semangat kebersamaan menjadikan hubungan yang biasanya terkesan formal berubah menjadi lebih hangat dan egaliter. Hal ini penting untuk mengurangi jarak sosial yang kerap terjadi antara aparat dan warga, sekaligus memperlihatkan bahwa komunikasi publik dapat terjalin tidak hanya di forum resmi, melainkan juga dalam aktivitas sosial sehari-hari.

Rangkaian kegiatan yang berlangsung dari pertengahan Agustus hingga awal September dilaksanakan secara berkelanjutan agar hasilnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Setiap sesi diskusi selalu ditutup dengan kesepakatan tindak lanjut, baik dalam bentuk penyusunan informasi yang lebih jelas mengenai program desa, maupun pembentukan kanal komunikasi sederhana yang dapat diakses warga, seperti pemanfaatan grup pesan singkat bersama RT dan RW. Keseluruhan kegiatan PKM ini menekankan pada keterlibatan semua pihak secara aktif. Aparatur desa dilatih tidak hanya dalam hal menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana menjadi pendengar yang baik, memahami aspirasi warga, serta menindaklanjuti masukan dengan sikap terbuka. Warga, di sisi lain, diberikan ruang seluas-luasnya untuk berpartisipasi tanpa merasa canggung atau terhalang oleh jarak struktural dengan aparat. Interaksi yang terjadi dalam kegiatan ini diharapkan mampu mengikis potensi kesalahpahaman, mencegah timbulnya prasangka, dan memperkuat rasa persaudaraan antarwarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penguatan komunikasi publik aparatur Desa Jambudipa yang berlokasi di Kampung Gandrung berjalan sesuai rencana dan mendapatkan respon positif dari seluruh pihak yang terlibat. Selama rentang waktu kegiatan, yaitu 18 Agustus hingga 12 September 2025, teridentifikasi beberapa hasil penting yang menunjukkan adanya perbaikan pola komunikasi antara aparatur desa dengan masyarakat.

Hasil pertama yang tampak nyata dari kegiatan penguatan komunikasi publik di Desa Jambudipa adalah meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam forum-forum diskusi. Pada tahap awal, partisipasi warga masih pasif dan terbatas pada beberapa tokoh masyarakat. Namun, melalui sosialisasi dan diskusi interaktif yang dilakukan secara berulang, semakin banyak warga berani menyampaikan aspirasi, pendapat, maupun keluhan. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan rasa percaya diri warga untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan desa serta tumbuhnya kenyamanan dalam berinteraksi dengan aparatur desa yang sebelumnya dianggap sulit dijangkau. Kondisi ini sejalan dengan temuan Ntou, Rahim, dan Tome (2025) yang menekankan pentingnya transformasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, serta Sigalingging dan Warjio (2014) yang menyoroti bahwa partisipasi aktif warga merupakan salah satu faktor kunci dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat lokal. Lebih lanjut, Al Farisi et al. (2025) menegaskan bahwa perilaku dan partisipasi politik masyarakat sipil menjadi indikator perkembangan sosial yang signifikan dalam pembangunan politik, sedangkan Esthi et al. (2025) menekankan pentingnya strategi kolaboratif untuk menghindari polarisasi sosial agar tercipta organisasi masyarakat yang lebih inklusif. Dalam konteks pengelolaan sumber daya desa, Kuddy (2018) juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan transparansi dan pengawasan, yang berimplikasi pada tata kelola yang lebih akuntabel.

Hasil berikutnya terlihat pada sikap aparatur desa yang semakin terbuka dalam menerima masukan. Dalam forum diskusi, aparatur tidak hanya menyampaikan informasi mengenai program-program desa, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk mendengarkan dengan sabar dan merespons

secara konstruktif. Aparatur yang semula cenderung menyampaikan informasi secara satu arah kini mulai memahami pentingnya komunikasi dua arah. Hal ini menjadi titik balik penting, karena komunikasi publik yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara, tetapi juga oleh kualitas mendengarkan dan merespons (Peng & Sun, 2013; Falco, E., & Kleinhans, 2018). Momentum peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia menjadi sarana pembuktian bahwa komunikasi publik tidak terbatas pada ruang formal, melainkan juga dapat diperkuat melalui kegiatan sosial yang bersifat non-formal. Kehadiran aparatur desa dalam kegiatan lomba rakyat, upacara, dan kerja bakti bersama warga menumbuhkan kesan positif yang mendalam. Masyarakat merasa aparatur tidak hanya hadir sebagai pemimpin formal, melainkan juga sebagai bagian dari komunitas yang sama-sama memiliki tanggung jawab sosial. Kedekatan emosional yang terbangun dalam suasana perayaan ini mengikis jarak sosial antara aparatur dan warga, sehingga hubungan komunikasi menjadi lebih hangat, cair, dan hangat.

Dari rangkaian kegiatan PKM memperlihatkan bahwa komunikasi publik aparatur desa merupakan salah satu faktor penentu terciptanya harmoni sosial. Kesalahpahaman, prasangka, dan konflik horizontal yang kerap muncul di tengah masyarakat sebagian besar bersumber dari lemahnya komunikasi. Dengan adanya forum interaktif yang teratur, warga merasa diberi ruang untuk didengar, sehingga potensi misskomunikasi dapat diminimalisasi. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi partisipatif yang menekankan keterlibatan semua pihak dalam proses komunikasi sebagai prasyarat terwujudnya masyarakat yang inklusif.

Selain itu, hasil kegiatan menunjukkan bahwa komunikasi publik tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat. Di Desa Jambudipa, nilai musyawarah, gotong royong, dan kebersamaan merupakan fondasi sosial yang kuat. Ketika aparatur desa mempraktikkan komunikasi terbuka yang selaras dengan nilai-nilai lokal tersebut, kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Dengan kata lain, komunikasi publik menjadi efektif karena dilakukan dengan memperhatikan konteks budaya yang ada. Pembahasan juga menekankan bahwa keberhasilan penguatan komunikasi publik tidak hanya diukur dari adanya forum diskusi atau kanal informasi, tetapi lebih jauh dari perubahan sikap dan perilaku baik aparatur maupun masyarakat. Aparatur yang lebih terbuka dan responsif serta warga yang lebih berani menyampaikan pendapat merupakan indikator perubahan yang penting. Kondisi ini menggambarkan adanya pergeseran dari pola komunikasi hierarkis menuju pola komunikasi yang lebih horizontal. Pergeseran ini membawa dampak positif terhadap kualitas interaksi sosial di desa, di mana potensi konflik dapat diredam dan rasa kebersamaan semakin kuat.

Meski demikian, kegiatan ini juga mengungkap beberapa kendala yang perlu diperhatikan dalam penguatan komunikasi publik. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu yang dimiliki aparatur desa untuk terlibat dalam setiap sesi diskusi. Kesibukan administrasi sering kali membuat sebagian aparatur tidak dapat hadir secara penuh. Selain itu, masih ada sebagian masyarakat yang enggan menyampaikan pendapat secara langsung karena merasa kurang percaya diri atau takut pendapatnya tidak diterima. Kendala ini menunjukkan bahwa penguatan komunikasi publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu periode kegiatan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang penguatan komunikasi publik aparatur Desa Jambudipa yang dilaksanakan di Kampung Gandrung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, menunjukkan hasil yang positif. Selama periode 18 Agustus hingga 12 September 2025, komunikasi antara aparatur desa dan warga menjadi lebih terbuka, partisipatif, dan berimbang. Warga yang awalnya cenderung pasif mulai berani menyampaikan aspirasi, sementara aparatur desa menunjukkan kemampuan untuk mendengarkan, memahami, serta merespons dengan empati. Pemanfaatan momentum peringatan HUT RI juga berhasil memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi jarak sosial antara aparatur dan masyarakat. Selain itu, adanya inovasi sederhana berupa kanal komunikasi digital seperti grup pesan

singkat mempermudah distribusi informasi dan memperkuat keterhubungan antara pemerintah desa dan warga.

SARAN

Kegiatan penguatan komunikasi publik di Kampung Gandrung Desa Jambudipa menghasilkan beberapa poin penting yang dapat dijadikan dasar pengembangan ke depan diantaranya ialah:

1. Komunikasi publik perlu dijalankan berkesinambungan agar perubahan sikap aparatur dan masyarakat bertahan.
2. Aparatur desa perlu meningkatkan kapasitas komunikasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital.
3. Forum partisipatif warga harus rutin difasilitasi agar semua lapisan masyarakat punya ruang setara.
4. Praktik komunikasi publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif harus menjadi budaya kerja sehari-hari.
5. Desa Jambudipa berpotensi menjadi contoh praktik baik komunikasi publik yang dapat direplikasi di wilayah lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada Forum Komunikasi Dosen (FKD) sebagai narasumber, aparat desa serta RT/RW Kampung Gandrung, Desa Jambudipa, serta seluruh peserta yang telah mendukung dan berpartisipasi aktif sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Esthi, R. B., Azizah, N., Jaelani, S., Simanjuntak, E., & Purnama, S. M. (2025). Strategi Penguatan Kolaborasi untuk Menghindari Polarisasi Sosial dalam Membangun Organisasi Inklusif di Kampung Bojong, Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. *Aksi Nyata: Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan*, 2(3), 173-189.
- Falco, E., & Kleinhans, R. (2018). Beyond Information-Sharing. A Typology Of Government Challenges And Requirements For Two-Way Social Media Communication With Citizens. *Electronic journal of E-government*, 16(1), pp32-45.
- Hana, H., & Rahman, A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(5), 238-249.
- Kuddy, A. L. L. (2018). Partisipasi Masyarakat, Transparansi Anggaran, dan Peran Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan di Kabupaten Paniai. *Jumabis*, 2(1), 259837.
- Mingkid, E., & Harilama, S. H. (2018). Komunikasi Organisasi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Masyarakat Di Desa Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 4(1), 68-80.
- Ntou, M. R., Rahim, E. I., & Tome, A. H. (2025). Transformasi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa atas Penyusunan RPJMDes di Desa Mutiara Kabupaten Boalemo. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 3(1), 66-74.
- Nurdin, I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku aparatur dan komunikasi birokrasi dalam pelayanan publik).
- Peng, S., & Sun, R. (2013). Fostering Two-Way Communication in Public Organizations. In *Public Administration Reformation* (pp. 144-162). Routledge.
- Rusmanto, W., Permatasari, A., & Sopandi, E. (2025). *Governansi Digital*. PT Penerbit Qriset Indonesia.

- Santoso, A. T., Hafid, A., Zuhro, F., Sos, M., Sulistiani, I., Kom, M. I., ... & Kom, M. I. (2025). KONSEP DASAR ILMU KOMUNIKASI. Cendikia Mulia Mandiri.
- Sigalingging, A. H., & Warjio, W. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 4(2), 116-145.
- Al Farisi, S., Firmansyah, W. A., Zain, D. F. Q., Rijal, K., & Yakin, A. K. (2025). Perilaku Dan Partisipasi Politik Masyarakat Sipil Sebagai Perkembangan Sosial Dalam Pembangunan Politik. Penerbit: Kramantara JS.
- Tasyah, A., Septiya, S. J. P., Fernanda, R. A., & Chesilia, P. (2021). Best practice kebijakan e-government dalam mengimplementasikan pelayanan publik di era new normal (Best practice of e-government policies in implementing public services in the new normal era). *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik (Jasispol)*, 1(1), 21-33.
- Utami, A. V., & Murwani, A. E. S. (2025). Peran Komunikasi Antarbudaya dalam Mengatasi Konflik Sosial Di Masyarakat Multikultural (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas). *Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 7(1), 235-245.
- Windiasih, R. (2019). Komunikasi pembangunan di era digital melalui e-government dalam pelayanan publik dan pemberdayaan. *Journal of Extension and Development*, 1(1), 14-21.